

**Journal of International Relations Diponegoro**  
**Volume 10 Issue 2 Year 2025 Page 1-15**

**PERUBAHAN SIKAP TURKI TERHADAP PERMOHONAN  
SWEDIA BERGABUNG DENGAN NATO 2022-2024**

---

*Received: 8th July 2025; Revised: 15th September 2025*

*Accepted: 21st November 2025*

---

**Hanip Arizal Sidiq**

**Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro**

**hanifarizalsidiq000@gmail.com**

**Abstrak**

Perang antara Rusia dan Ukraina telah mempengaruhi banyak aspek komunitas internasional. Salah satunya terkait dengan keamanan negara, khususnya Swedia. Swedia, yang merasa intensitas perang semakin meningkat, akhirnya mencari perlindungan keamanan dengan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO. Namun, jalan Swedia untuk bergabung dengan NATO tidaklah mudah karena adanya penolakan dari Turki terkait dukungan Swedia terhadap organisasi yang dianggap Turki sebagai organisasi teroris, yaitu PKK. Namun, setelah Swedia memenuhi tuntutan Turki terkait ketidakstabilan di Turki, Turki akhirnya menyetujui permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Berdasarkan hal ini, penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Turki terhadap permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Penelitian ini menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri K.J Holsti dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi faktor domestik dan juga faktor eksternal. Selain faktor-faktor tersebut, pandangan Presiden Erdogan dalam menanggapi permintaan Swedia juga merupakan hal yang dapat memperkuat faktor-faktor di atas.

**Kata kunci:** kebijakan luar negeri, keanggotaan, NATO, penolakan, Swedia, Turki

**Abstract**

*The war between Russia and Ukraine has affected many aspects of the international community. One of them is related to the security of the country, especially Sweden. Sweden, which felt that the intensity of the war was increasing, finally sought security protection by applying to join NATO. However, Sweden's path to join NATO was not easy because there was a rejection from Turkey regarding Sweden's support for an organization that Turkey considers a terrorist organization, namely the PKK. However, after Sweden fulfilled Turkey's demands regarding Turkey's unrest, Turkey finally approved Sweden's application to join NATO. Based on this, this research is conducted to see factors that influence Turkey's policy change towards Sweden's application to join NATO. This research uses K.J Holsti's theory of foreign policy change and uses a qualitative*

*descriptive method. The results of the study show that there are several factors that influence Turkey's foreign policy changes, these factors are divided into domestic factors and also external factors. Apart from these factors, how President Erdogan's view in responding to Sweden's request is also one thing that can strengthen the factors above.*

**Keywords:** *foreign policy, membership, NATO, rejection, Sweden, Turkey*

## **PENGANTAR**

Swedia dan Finlandia merupakan negara yang mempertahankan kebijakan netralitas militer. Akan tetapi, perubahan dinamika keamanan di kawasan Laut Baltik pada bulan Februari 2022 yang berkaitan dengan tindakan Rusia terhadap Ukraina dan meningkatnya invasi Rusia di kawasan tersebut hingga menjadi perang terbesar di Benua Eropa pasca Perang Dunia Kedua, telah mendorong Swedia dan Finlandia untuk berdiskusi mengenai potensi keanggotaan NATO. Hingga pada bulan Mei 2022 Finlandia dan Swedia mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO (Mitchell, 2022).

Diskusi terkait potensi keanggotaan dan juga permohonan bergabung untuk menjadi anggota NATO yang dilakukan oleh Swedia dan Finlandia termasuk ke dalam isu terkait perubahan kebijakan luar negeri. Isu ini merupakan isu yang cukup sering terjadi dalam hubungan internasional. Pasalnya, kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah-ubah berdasarkan kondisi politik yang ada baik di dalam negara tersebut maupun dari luar (Holsti, 1982). Namun, perjalanan Swedia dan Finlandia tidak mulus dikarenakan Turki sebagai salah satu negara yang menjadi anggota NATO menolak permohonan yang diajukan oleh Swedia dan Finlandia. Akan tetapi, setelah melangsungkan beberapa pertemuan serta perjanjian antara pihak – pihak yang bersangkutan, Turki akhirnya menerima permohonan yang diajukan oleh Swedia dan Finlandia untuk menjadi anggota NATO.

Pada tanggal 4 April 2023, tepat 74 tahun setelah NATO dibentuk, Finlandia akhirnya resmi menjadi anggota ke 31 NATO setelah mendapat persetujuan dari semua negara anggota termasuk Turki, yang merupakan syarat untuk bergabung dengan organisasi tersebut (Masters, 2023). Berbeda dengan Finlandia, Swedia masih mengalami kendala untuk bergabung dengan NATO karena Turki sebagai salah satu anggota NATO tidak menyetujui. Turki menentang aksesi Swedia ke NATO dengan alasan kurangnya dukungan dari Swedia untuk melakukan perlawanan terhadap PKK (Partiya Karkeran Kurdistan) atau Partai Pekerja Kurdistan dan YPG (Yekîneyê Parastina Gel) atau Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah. Turki juga menuduh Swedia menerima beberapa anggota PKK di negaranya, yang dianggap sebagai 'organisasi teroris' oleh Turki, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan PBB. Selain itu, alasan lain mengapa Turki enggan menyetujui penerimaan anggota NATO adalah karena Swedia memberlakukan embargo senjata terhadap Turki pada tahun 2019 menyusul serangan militer yang menargetkan YPG di Suriah utara (BBC, 2022b). Hingga pada bulan Juni 2022, Turki mencapai kesepakatan dengan Swedia saat diadakan pertemuan NATO di Madrid, Turki akan mencabut hak vetonya sebagai imbalan atas pencabutan sebagian embargo senjata terhadap Turki. Di lain sisi, Swedia juga berjanji untuk menindak keras pendanaan dan perekutan oleh PKK di negaranya (Clapp, 2022).

Isu ini menjadi menarik untuk dikaji karena selain terpenuhinya tuntutan yang diberikan Turki kepada Swedia, perubahan kebijakan Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO juga berpengaruh terhadap jalan Turki menuju Uni Eropa. Keputusan Turki dalam meratifikasi Swedia sebagai anggota NATO menghadirkan dinamika geopolitik yang unik dan belum banyak diteliti, serta menawarkan adanya pembaharuan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi tindakan dan keputusan yang ditunjukkan oleh Turki dalam prosesnya hingga bersedia untuk meratifikasi Swedia menjadi anggota NATO, sebuah topik yang masih mendapat perhatian ilmiah terbatas mengingat ini merupakan isu yang terbilang baru untuk diteliti. Meskipun penelitian yang ada telah mengkaji perluasan NATO dan peran Turki secara spesifik dalam aliansi tersebut, yakni penelitian yang dilakukan oleh Bağbaşlioğlu (2023), hanya ada sedikit penelitian yang mengkaji latar belakang pengambilan keputusan Turki dalam aksesi Swedia menuju anggota NATO.

Pada artikel ini, penulis juga berupaya untuk menawarkan analisis mendalam terhadap konteks sejarah, pertimbangan geopolitik, dan hubungan diplomatik yang membentuk kebijakan Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO melalui pertimbangan kepentingan strategis Turki dan permasalahan keamanan regional. Lebih jauh lagi, artikel ini mengeksplorasi bagaimana Turki memainkan peran sebagai pemain penting dalam aliansi NATO. Dengan menyoroti kompleksitas seputar sikap Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengambilan keputusan Turki dan dinamika yang terjadi dalam aliansi tersebut berkaitan dengan aksesi Swedia menuju anggota NATO.

## **METODE RISET**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana dalam metode tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan serta menyusun data, yang kemudian menganalisis data tersebut dengan metode eksplanatif untuk menjelaskan hasil dari analisis data yang telah dikumpulkan. Dalam kasus ini, penulis melakukan analisis terkait fenomena perubahan sikap Turki terhadap permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Kemudian, penulis menggunakan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk menjelaskan fenomena perubahan kebijakan Turki terhadap permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO.

## **PEMBAHASAN**

### **Polemik Turki dan Swedia Dalam Keanggotaan North Atlantic Treaty Organization (NATO)**

Hubungan diplomatik antara Turki dan Swedia bisa terbilang cukup stabil, tidak banyak berubah pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin. Turki memilih bergabung dengan NATO pasca Perang Dunia II tepatnya pada 18 Februari 1952. Saat itu Turki di bawah kepemimpinan H.E. Mr Celâl Bayar, melihat perselisihan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dapat membahayakan negaranya, mengambil langkah politik untuk bergabung dengan NATO sebagai jaminan keamanan serta memperkuat identitas baratnya (NATO, 2024).

Sementara Swedia mengambil jalannya sendiri dengan memilih untuk tetap netral tidak memihak siapapun baik blok barat maupun blok timur. Swedia juga sudah memiliki reputasi sebagai negara yang mendukung hak asasi manusia secara penuh. Hal itu dilakukan oleh Swedia dalam rangka menghindari aliansi militer yang dapat menyebabkan ketegangan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berangkat dari reputasi itulah mengapa Swedia tidak pernah mengambil sikap berpihak kepada siapa pun. Meskipun begitu, Turki dan Swedia tetap berhubungan baik dan saling menghormati (Government Offices of Sweden, 2024).

Hubungan Turki dan Swedia bisa dikatakan cukup pragmatis, mengingat hubungan kedua negara hanya sebatas hubungan diplomatik yang didasarkan pada keuntungan bersama sebagai tujuan kerja sama. Hingga pada tahun 1980 - 1990an, ketika para pengungsi Kurdi mulai mencari suaka di Swedia dan mendapatkan dukungan untuk aktif dalam aktivitas politik serta advokasi untuk memperjuangkan hak – haknya. Dukungan yang diberikan Swedia kepada para pengungsi Kurdi merupakan penyebab awal memburuknya hubungan antara kedua negara tersebut (Khayati, 2012).

Buruknya hubungan Turki dengan Swedia terjadi pada beberapa isu seperti adanya tuduhan Swedia kepada Turki terkait Genosida Armenia. Tuduhan ini disebabkan karena pada Kongres yang dilaksanakan di Washington D.C 10 Oktober 2007 silam, Amerika Serikat meloloskan resolusi terhadap peristiwa yang terjadi antara Armenia dan Turki. Dari voting tersebut, Amerika menganggap bahwa Turki telah melakukan genosida kepada jutaan warga Armenia pada masa Perang Dunia I oleh dinasti Ottoman. Selain Amerika Serikat, Swedia juga menggelar voting yang dilakukan oleh parlemen mereka mengenai genosida Turki terhadap Armenia, dan hasilnya menunjukkan bahwa Turki telah mendukung pembunuhan massal pada tahun 1915 kepada umat kristiani Armenia. Namun hal itu disangkal oleh Ankara, mereka menganggap hal itu terlalu mengada-ada, karena angka korban yang dibeberkan sebanyak 1.5 juta jiwa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Penilaian yang dirasa kurang objektif itu akhirnya membuat Ankara menarik duta besar mereka baik dari Washington maupun Stockholm. Penarikan duta besar terjadi karena Turki menganggap Swedia melakukan tuduhan dengan alasan bahwa mereka merupakan negara sekuler yang mengedepankan hak asasi manusia tanpa tahu sejarahnya. Di sisi lain, beberapa waktu sebelum adanya voting resolusi tersebut, Presiden Turki yakni Recep Tayyip Erdogan berencana ingin melakukan kunjungan ke Swedia. Akan tetapi, menyusul adanya aksi tuduhan tersebut, Erdogan membatalkan rencananya (RFERL, 2010).

Buruknya hubungan Turki dengan Swedia juga disebabkan karena Turki melakukan tuduhan kepada Swedia karena dinilai mendukung organisasi teroris PKK, yang mana tuduhan ini diawali pada Oktober 2019, dimana Turki mengirim konvoi militer ke Timur Laut Suriah dengan tujuan untuk mendirikan zona aman yang dikenal dengan Operation Peace Spring. Sebenarnya, pembangunan zona aman ini sudah direncanakan Presiden Erdogan sejak 2017. Operation Peace Spring dilakukan seraya Amerika Serikat yang menarik mundur pasukannya dari daerah tersebut pasca

penumpasan kelompok ISIS yang dilakukan bersama dengan YPG dan PKK (Butler, 2019). Alih-alih membuat zona aman di wilayah Suriah, Turki justru menyerang YPG yang dianggap Turki sebagai organisasi teroris (Uras, 2019).

Serangan yang dilakukan oleh Turki kepada YPG di Timur Laut Suriah tentunya berdasar. Kekhawatiran akan kelompok YPG dan PKK yang telah lama menimbulkan cukup banyak masalah bagi Turki merupakan alasan mengapa mereka memutuskan menyerang YPG ketika ada kesempatan. YPG yang merupakan afiliasi dari PKK sendiri memiliki sekitar 20.000 hingga 30.000 personel dan bermarkas di Suriah Utara (EUAA, 2020). Sedangkan PKK sendiri memiliki sekitar 4000 hingga 5000 anggota dan bermarkas besar di Irak (NCTC, 2022). Jumlah tersebut sangat besar bagi Turki, selain anggotanya yang cukup banyak, mereka juga tersebar di Eropa dan Timur Tengah. Hal tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi keamanan nasional Turki.

Isu selanjutnya yang memperburuk hubungan internasional antara Turki dengan Swedia adalah adanya penghentian ekspor senjata Swedia kepada Turki dan isu agama karena adanya pembakaran Al-Quran di Swedia yang dilakukan oleh demonstran. Penghentian ekspor senjata Swedia kepada Turki diawali dengan isu penyerangan yang dilakukan Turki kepada YPG di wilayah Timur Laut Suriah. Sebagai negara sekuler, Swedia jelas mengecam tindakan yang dilakukan oleh Turki. Tindakan Turki tersebut menyebabkan pemberlakuan kebijakan larangan ekspor senjata atau yang kita kenal sebagai embargo senjata ke Turki. Pengambilan langkah embargo oleh Swedia merupakan hal yang sangat penting mengingat hubungan militer serta perdagangan (ekspor impor) antara Turki dan Swedia yang sebelumnya cukup erat. Menurut data yang penulis dapatkan dari Arsip Laporan Nasional Ekspor Senjata Swedia selama tiga tahun terakhir sebelum pemberlakuan embargo, yakni dari 2017 hingga 2019, Turki telah melakukan impor senjata dari Swedia senilai 412 juta SEK. Dimana pada tahun 2017 Turki melakukan impor senjata senilai 71 juta SEK, lalu di tahun 2018 senilai 299 juta SEK, dan Turki sempat melakukan impor senjata senilai 42 juta SEK sebelum pemberlakuan embargo oleh Swedia pada tahun 2019. Berdasarkan data terkait pembelian yang dilakukan pada tahun 2019, Turki telah membeli 3 jenis peralatan persenjataan dari Swedia antara lain Fire Control Equipments, Electronic Equipments “spacecraft”, dan Technology (Sweden Government Communication, 2020).

Penangguhan ekspor senjata ini tidak hanya dilakukan oleh Swedia saja. Ada beberapa negara yang juga melakukan pembatasan hingga pelarangan ekspor senjata ke Turki, diantaranya adalah Prancis, Jerman, dan Belanda. Swedia melakukan embargo ini atas dasar sebagai negara sekuler yang mendukung Hak Asasi Manusia, dan kekhawatiran akan eskalasi konflik yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terhadap warga sipil. Mereka yang merupakan negara netral semenjak lama itu, melakukan protes yang kedua kalinya kepada Turki setelah sebelumnya melakukan resolusi terkait genosida yang dilakukan Turki ke Armenia pada tahun 1915 silam. Pelarangan ekspor senjata ini dilakukan oleh Swedia tanpa tenggat waktu yang ditentukan. Penulis melihat kebijakan pelarangan ekspor senjata

oleh Swedia kepada Turki ini makin memperburuk hubungan bilateral antar dua negara tersebut.

Selanjutnya isu agama yakni adanya aksi pembakaran Al-Quran di berbagai kota di Swedia karena adanya aksi demonstrasi. Hal tersebut tentu memicu kemarahan bagi seluruh Muslim di dunia khususnya Turki. Turki geram dan semakin enggan untuk menerima pencalonan Swedia sebagai anggota baru NATO (Anadolu, 2023). Hal itu dibuktikan dengan pernyataan oleh Presiden Erdogan setelah pertemuan kabinet di Ankara yang mengatakan:

*“Sweden, don’t even bother! As long as you allow my holy book, the Quran, to be burned and torn, and you do so together with your security forces, we will not say ‘yes’ to your entry into NATO” (Fraser, 2023).*

Respons Swedia yang seakan-akan membiarkan hal semacam penistaan agama tersebut dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi ini juga tidak masuk akal. Swedia yang menjadi negara paling sekuler dan liberal ini memang memiliki aturan pada undang-undang mereka mengenai kebebasan berekspresi. Nyatanya, otoritas Swedia memberikan izin bagi pelaku pembakaran oleh imigran Irak, serta bungkam atas kejadian pembakaran Al-Qur'an yang dilakukan oleh kelompok anti-Islam Danske Patrioter selama tiga hari berturut-turut (DW, 2023). Kejadian inilah yang juga membuat Turki sebagai negara mayoritas muslim geram dengan Swedia yang dianggap tidak bisa mengendalikan masalah, terlebih kasus ini terjadi di negaranya sendiri (Sorongan & Arbar, 2023). Penulis melihat Swedia yang menjauhkan diri dari masalah ini karena status negara mereka dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, akan tetapi di sisi lain kebebasan berpendapat di sini sudah masuk ke dalam penistaan agama yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Swedia.

Banyaknya polemik dikarenakan isu-isu yang terjadi antara Swedia dengan Turki mengakibatkan sulitnya Swedia bergabung pada NATO karena Turki merupakan negara selain Amerika yang memiliki pengaruh besar pada NATO. Posisi Turki pada NATO salah satunya dapat terlihat pada konflik antara Rusia dan Ukraina, dimana Turki menempatkan dirinya sebagai mediator antara kedua negara. Di satu sisi Turki yang berusaha terus meningkatkan kerja sama bilateral dengan Ukraina, namun di sisi lain Turki harus berhati – hati terhadap respons Rusia. Turki berani menempatkan diri sebagai mediator dan terus meningkatkan kerja sama dengan Ukraina didasari oleh ketergantungan Rusia yang kuat kepada Turki.

Kendati sedari awal adanya pencalonan diri Swedia untuk mencalonkan diri menjadi anggota NATO ditolak oleh Turki, namun seiring berjalannya waktu semakin memberikan respons yang kian baik untuk negara nordik tersebut. Pasalnya, alasan permohonan yang dibuat cukup masuk akal dan berhubungan dengan stabilitas keamanan negara-negara di Eropa. Meski sejarah hubungan mereka yang kurang begitu baik, namun Turki melihat hal ini sebagai langkah untuk memperkuat posisinya di NATO, sampai-sampai Turki memberikan syarat kepada Swedia untuk menjadi anggota baru NATO. Syarat yang diberikan Turki pun juga masih terbilang masuk

akal. Karena jika ditarik kesimpulannya, kepentingan Turki yang ingin memberantas PKK terlihat sejalan dengan negara Swedia yang merasa terancam dengan invasi Rusia (Spicer, 2023).

Turki tidak semudah itu untuk memberikan lampu hijau bagi Swedia, karena bagi Turki, ada beberapa persyaratan yang menurut mereka harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan dari Turki. Syarat pertama terkait Swedia yang menampung serta memberikan dukungan kepada kelompok PKK di negaranya, Turki meminta Swedia menandatangani perjanjian untuk melawan kelompok PKK. Syarat berikutnya yang berkaitan dengan dukungan terhadap PKK, Turki meminta Swedia untuk mengekstradisi individu yang merupakan dianggap sebagai anggota PKK di negaranya. Kemudian syarat terakhir berhubungan dengan embargo senjata yang dilakukan oleh Swedia pasca penyerangan Turki di Suriah Utara, Turki meminta Swedia untuk mencabut embargo tersebut (Hayatsever & Spicer, 2024).

### **Analisis Perubahan Kebijakan Turki Terhadap Permohonan Swedia Untuk Bergabung Dengan NATO**

Menurut teori perubahan kebijakan luar negeri oleh K.J Holsti, disebutkan bahwasanya ada dua jenis faktor dalam Independent Variable yang dapat mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Faktor tersebut antara lain adalah faktor domestik dan faktor eksternal. Faktor domestik sendiri merupakan faktor – faktor yang berasal dari dalam suatu negara, sedangkan faktor eksternal berasal dari dunia internasional (Holsti, 1982). Faktor domestik yang dapat mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri ada beberapa macam, antara lain situasi politik, keamanan nasional, kondisi ekonomi, serta opini publik dari dalam suatu negara (Agassi, 2015). Dalam perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Turki terhadap permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO, terdapat pengaruh dari beberapa faktor domestik Turki terhadap perubahan kebijakan yang dilakukan. Selain dari Faktor domestik, faktor eksternal dalam perubahan kebijakan Turki sendiri meliputi beberapa hal yaitu penyesuaian UU anti terorisme oleh Swedia, pencabutan embargo senjata oleh Swedia kepada Turki, dan pembukaan akses pembelian pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat kepada Turki.

Faktor domestik tentunya sangat berpengaruh terhadap terbentuknya kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO, terdapat faktor domestik dari Turki yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut. Faktor pertama yang menjadi faktor domestik adalah situasi politik terkait permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Presiden Erdogan memanfaatkan pengalaman pada bidang politik untuk menolak Swedia bergabung dengan NATO, untuk mencari suara dari kaum nasionalis Turki dalam memenangkan Pemilihan Presiden tahun 2023. Hal tersebut tentu makin memperlebar jalan bagi Swedia untuk mendapatkan persetujuan Turki dalam bergabung dengan NATO. Selanjutnya keamanan nasional Turki terhadap perubahan kebijakan terkait keanggotaan Swedia di NATO menjadi faktor domestik terkait keanggotaan Swedia di NATO. Sejarah mengenai ancaman – ancaman terorisme dari

PKK kepada Turki telah terjadi sejak awal tahun 1980an. Dimana pada tahun 1980, kelompok PKK bersama dengan Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA) mengebom konsulat jenderal Turki di Strasbourg, Prancis. Pengeboman tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan pemerintah Turki terhadap rakyat Armenia dan Kurdi. Kemudian pada Juni tahun 1987, PKK melakukan penyerangan terhadap desa Pinarik yang terletak di provinsi Mardin, Turki bagian tenggara. Penyerangan tersebut memakan korban sebanyak 30 warga lokal yang kebanyakan korbannya merupakan perempuan dan anak – anak. Masih di tahun yang sama, tepatnya bulan Agustus 1987, PKK kembali menyerang salah satu desa di Turki yaitu desa Milan yang terletak di provinsi Siirt di bagian Timur Turki. Dalam serangan tersebut, terdapat 27 korban meninggal dunia mulai dari anak – anak, perempuan, hingga lansia. Kemudian di tengah – tengah proses aksesi Swedia menuju NATO, tepatnya pada 13 November 2022, PKK kembali melakukan aksi terorisme nya di Turki. Aksi tersebut berupa serangan bom yang diledakkan di jalanan yang sangat ramai di pusat Istanbul. Aksi pengeboman tersebut memakan korban 6 orang meninggal dunia dan 81 orang luka – luka (Gauthier-Villars, 2022).

Dilema terkait ancaman terorisme dari organisasi PKK ini membuat Turki sangat memperhatikan serta memperjuangkan keamanan nasionalnya. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Turki demi meningkatkan keamanan nasionalnya, salah satunya dengan memerangi organisasi PKK yang menjadi ancaman dari tahun ke tahun (Radu, 1999). Mengenai hal tersebut, isu terkait Swedia yang menampung serta memberikan dukungan kepada organisasi PKK yang merupakan sebuah ancaman keamanan nasional bagi Turki menjadi perhatian terbesar oleh Turki. Hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan bagi Turki untuk menerima Swedia sebagai anggota baru NATO. Maka dari itu, Turki mengajukan tuntutan kepada Swedia untuk mempertegas posisi Swedia dalam menangani kelompok yang dianggap Turki sebagai teroris yaitu kelompok PKK. Kemudian setelah Swedia memenuhi tuntutan yang diberikan oleh Turki dan dirasa keamanan nasional Turki dapat terjamin dengan masuknya Swedia sebagai anggota NATO, Turki dapat menyetujui aksesi Swedia (Hayatsever & Gumrukcu, 2024).

Faktor domestik terakhir adalah kondisi ekonomi Turki terhadap perubahan sikap terkait permohonan bergabung Swedia dengan NATO. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi setelah Presiden Erdogan menerapkan kebijakan low-interest-rate berdasarkan kepercayaannya bahwa semakin tinggi suku bunga dari sebuah negara maka akan semakin tinggi pula nilai inflasi. Sejak penerapan kebijakan tersebut pada tahun 2021, inflasi yang terjadi di Turki terus meningkat. Erdogan menyebut suku bunga adalah “ibu dan ayah dari semua kejahanatan”. Penurunan suku bunga dari 19% menjadi 14% menyebabkan nilai tukar lira Turki terjun bebas, yang membuat negara tersebut harus membayar lebih mahal untuk barang-barang impor (BBC Indonesia, 2022).

Dukungan terhadap Swedia di NATO adalah langkah yang sangat pragmatis untuk mencapai stabilitas ekonomi dan politik yang lebih besar. Penulis juga beranggapan bahwa Turki telah menyeimbangkan kepentingan domestik dengan

kebutuhan internasional, menjadikan krisis ekonomi sebagai faktor pendorong perubahan kebijakan yang lebih fleksibel terhadap Swedia dan NATO. Krisis moneter ini, dengan segala dampaknya, mendorong Turki untuk lebih kooperatif dalam kebijakan luar negeri, termasuk mengenai keanggotaan Swedia di NATO, dengan harapan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan ekonomi domestiknya. Di sisi lain, jika penerimaan Swedia menjadi anggota NATO dapat membantu membuka jalan bagi Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa, hal tersebut tentunya dapat membantu memperbaiki perekonomian Turki yang sedang terpuruk.

Selain faktor domestik, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, perubahan kebijakan luar negeri Turki juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa Faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki. Faktor pertama yakni penyesuaian UU anti teroris oleh Swedia, dimana penyesuaian UU anti terorisme tersebut meliputi pembatasan terhadap perkumpulan yang menyangkut ataupun berhubungan dengan terorisme, ataupun mendukung terorisme. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mempermudah Swedia dalam mengadili anggota PKK yang dianggap Turki sebagai kelompok teroris. Amandemen UU anti teroris tersebut kemudian disahkan pada 1 Juni 2023 dengan hasil pemungutan sebanyak 278 suara di parlemen Swedia yang beranggotakan 349 orang (TRT World, 2022).

Faktor selanjutnya adalah pencabutan embargo senjata yang dilakukan oleh Swedia. Tujuan diberlakukannya embargo senjata kepada Turki adalah untuk membatasi langkah Turki agar tidak melakukan penyerangan kembali pasca serangan yang dilakukan oleh Turki di Suriah Utara. Setelah Turki kemudian mengajukan tuntutan kepada Swedia untuk mencabut embargo tersebut demi kelancaran akses menuju anggota NATO, Swedia kemudian mencabut embargo yang diberlakukan kepada Turki. Faktor terakhir merupakan penawaran pembelian pesawat tempur F-16 oleh Amerika. Turki yang sebelumnya tergabung dalam program pembuatan pesawat tempur F-35 dan memiliki hak untuk membeli pesawat tempur tersebut akhirnya mendapatkan teguran keras berupa penghapusan Turki dari program tersebut karena Turki melakukan pembelian air defense dari Rusia. Namun kemudian Amerika menawarkan akses untuk dapat membeli pesawat tempur F-16 jika Turki bersedia menerima Swedia untuk bergabung dengan NATO.

Tidak hanya faktor domestik dan eksternal, persepsi elite politik yang merupakan intervening variable dapat digunakan sebagai argumen penguat dari faktor – faktor yang telah disebutkan, terhadap perubahan kebijakan luar negeri Turki. Menteri luar negeri Turki saat itu, Mevlut Cavusoglu menyatakan pada wawancara dengan para reporter bahwa Turki mengharapkan Swedia mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah keamanan yang menjadi perhatian utama Turki, terutama terkait aktivitas PKK. Cavusoglu menekankan bahwa Turki tidak bisa menerima anggota NATO yang mendukung organisasi yang dianggap teroris oleh Ankara. Setelah itu ia menjelaskan mengenai kerja sama anti-terorisme yang diperkuat

antara Turki dan Swedia adalah hasil yang sangat positif dari dialog yang intensif. Cavusoglu menyebutkan bahwa Swedia telah membuat langkah - langkah signifikan dalam memerangi terorisme, yang merupakan salah satu syarat utama dari Turki untuk menyetujui keanggotan Swedia di NATO (Erkus, 2022).

Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri baru Turki yang menjabat sejak Juni 2023, mengatakan bahwa pihaknya sedang bekerja keras dalam perdebatan yang terjadi dalam parlemen Turki terkait penerimaan Swedia sebagai anggota NATO. Ia juga mengatakan bahwa sebelum tahun 2023 berakhir, pihaknya dipastikan sudah menerima keanggotaan Swedia di NATO. Pernyataan Hakan Fidan disampaikan kepada salah satu rekan di NATO yang namanya dirahasiakan. Rekan tersebut mengatakan:

*“He was working hard on Sweden's NATO ratification which is currently being debated by the Turkish parliament and provided a likely timeline of before year-end for the Nordic country to formally join the alliance”* (Pamuk, 2023).

Hal tersebut dibuktikan dengan penerimaan permohonan keanggotaan Swedia di NATO oleh komisi parlemen Erdogan di partai miliknya yaitu Partai AK (Adalet ve Kalkınma Partisi), pada 26 Desember 2023.

Apabila melihat fase awal saat Swedia mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO, Presiden Erdogan merespons dengan penolakan keras atas permohonan tersebut. Penolakan keras yang diberikan oleh Erdogan didasari oleh kekhawatiran atas status Swedia saat itu yang masih netral dan dianggap mendukung organisasi teroris. Erdogan sendiri mengatakan jika pihaknya menyetujui permohonan Swedia, dikhawatirkan nantinya akan muncul ancaman terorisme baik itu bagi negaranya maupun negara anggota NATO. Penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan pandangan Presiden Erdogan terkait permohonan keanggotaan Swedia di NATO, memang pada awalnya Erdogan menolak untuk menerima permohonan tersebut. Akan tetapi, penolakan yang diberikan oleh Presiden Erdogan memiliki alasan yang jelas. Kemudian setelah pemenuhan syarat yang mendasari alasan penolakan Erdogan, terbukti pihaknya memberikan dukungan terkait keanggotaan Swedia. Pandangan Erdogan pun berubah karena dapat berpikir jernih dan melihat alasan yang masuk akal dan berdasar terkait pengajuan permohonan Swedia untuk menjadi anggota NATO.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan variabel – variabel dari teori perubahan kebijakan luar negeri Holsti, penulis dapat menarik benang merah bahwasanya perubahan kebijakan luar negeri Turki disebabkan oleh faktor domestik dan faktor eksternal. Dimana dalam faktor domestik, kondisi ekonomi, keamanan nasional, serta situasi politik di Turki memiliki peran terhadap perubahan kebijakan luar negeri Turki. Sedangkan dari faktor eksternal, terdapat pengesahan UU anti teroris oleh Swedia, pembukaan embargo senjata oleh Swedia, dan izin pembelian pesawat tempur F-16 oleh Amerika yang juga berpengaruh

terhadap perubahan kebijakan Turki. Selain dari faktor domestik dan eksternal, ada juga persepsi dari Erdogan yang menurut penulis merupakan faktor penentu perubahan kebijakan Turki. Sikap Erdogan yang awalnya menentang permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO terkait isu terorisme, lalu kemudian melihat kondisi yang saat ini terjadi antara Rusia dan Ukraina, Erdogan dapat menilai permohonan keanggotaan tersebut merupakan langkah yang wajar. Persepsi dari Erdogan sendiri menjadi penguatan bagi faktor domestik dan faktor eksternal dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap permohonan Swedia untuk menjadi anggota NATO. Akan tetapi penulis menganggap bahwa faktor eksternal, khususnya kepatuhan Swedia yang paling berpengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri Turki.

Dapat dipahami bahwa reorientasi kebijakan luar negeri Turki mengacu kepada perubahan signifikan dalam pendekatan negara terhadap masalah internasional. Dalam konteks ini, Turki mengalami perubahan arah kebijakan seiring dengan perkembangan geopolitik dan faktor domestik yang mempengaruhi keputusan pemerintah. Sebelum reorientasi, kebijakan luar negeri Turki berfokus pada memperkuat hubungan dengan negara-negara barat dan mengatasi ancaman dari kelompok teroris di wilayahnya. Namun, perubahan dinamika internasional dan domestik memicu perlunya penyesuaian strategi. Reorientasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor eksternal seperti adanya campur tangan Amerika, serta faktor domestik seperti situasi politik di Turki. Selain itu, peristiwa global seperti invasi Rusia ke Ukraina juga memainkan peran penting dalam perubahan kebijakan. Turki akhirnya mengubah kebijakan luar negerinya untuk mendukung bergabungnya Swedia ke NATO setelah memenuhi sejumlah tuntutan, termasuk pengesahan UU anti terorisme dan penghapusan embargo senjata. Berdasarkan hal tersebut, faktor eksternal yang sejalan dengan pemenuhan tuntutan dari Turki memiliki peran yang sangat dominan serta signifikan terhadap perubahan kebijakan Turki. Kebijakan baru ini diterapkan melalui diplomasi aktif dan persetujuan legislatif. Reorientasi kebijakan ini berdampak positif terhadap hubungan Turki dengan negara-negara NATO dan meningkatkan posisi strategisnya di kancah internasional. Berdasarkan teori Holsti, reorientasi kebijakan luar negeri Turki mencerminkan respons strategis terhadap perubahan global dan domestik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor domestik dan eksternal yang mempengaruhi perubahan kebijakan Turki. Faktor domestik yang penulis temukan terkait perubahan kebijakan Turki antara lain adalah (1) Keamanan nasional Turki; (2) Situasi politik Turki; dan (3) Kondisi ekonomi Turki. Sedangkan dari faktor eksternal, penulis menemukan adanya (1) Penyesuaian UU anti teroris oleh Swedia; (2) Pencabutan embargo senjata oleh Swedia; serta (3) Pemberian akses pembelian pesawat tempur F-16 oleh Amerika kepada Turki. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki adalah faktor

eksternal. Dimana faktor eksternal tersebut sebagian besar lahir dari tuntutan yang diberikan oleh Turki kepada Swedia.

Dari fenomena yang terjadi dalam proses aksesi Swedia menuju keanggotaan NATO, penulis dapat menyampaikan bahwa suatu negara tentunya akan melakukan penyesuaian kebijakan jika hal tersebut menyangkut kepada kepentingan nasional dari negara tersebut. Hal tersebut yang mendorong Turki untuk menolak aksesi Swedia, hingga tuntutan yang diberikan oleh Turki kepada Swedia dapat dipenuhi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia akademis. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar para akademisi yang akan melakukan penelitian dengan topik relevan dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website, berita, serta sosial media. Meskipun data yang diperoleh melalui sumber sekunder, hal tersebut tidak mengurangi kredibilitas data karena penulis memilih sumber – sumber yang dapat dipercaya. Akan tetapi, penulis tentu menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar bisa menggunakan data primer sebagai sumber penelitian. Hal tersebut selain jelas dan dapat dipercaya, sumber data primer akan mempermudah peneliti untuk mencari data sebagai dasar dari penelitian.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Artikel jurnal ini dihasilkan atas bantuan dan dukungan dari orang tua, teman-teman, serta dosen-dosen terkasih sehingga artikel dapat diselesaikan. Tanpa bantuan dari mereka, penulis tidak akan berhasil menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Penulis berharap artikel ini dapat berguna untuk penelitian lain di kemudian hari dan juga untuk masyarakat. Konten dan isi dalam artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## **REFERENSI**

- Agassi, M. B., Studi, P., Internasional, H., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Islam, U., & Syarif, N. (2015). NEGERI BELANDA TERHADAP PROPOSAL KEANGGOTAAN TURKI KE UNI EROPA PADA TAHUN 2005.
- Anadolu. (2023). Seluruh dunia kecam aksi pembakaran Al-Quran di Swedia. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/id/analisis/seluruh-dunia-kecam-aksi-pembakaran-al-quran-di-swedia/2794709>
- BBC Indonesia. (2022). Inflasi di Turki meroket sampai 78%, WNI gulung tikar dan dikenakan harga lebih tinggi ketimbang warga lokal. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62036682>
- BBC. (2022b). Perang Ukraina: Mengapa Turki tidak ingin Swedia dan Finlandia gabung dengan NATO? BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61553448>
- Butler, D., & Spicer, J. (2023). Erdogan names Erkan to head Turkey central bank, policy pivot expected. Reuters. <https://www.reuters.com/world/middle-east/erdogan-appoints-erkan-turkey-central-bank-governor-2023-06-08/>
- Clapp, S. (2022). Outcome of the Madrid NATO Summit, June 2022. European Parliamentary Research Service, July, 28–29.

- <https://epthinktank.eu/2022/07/18/outcome-of-the-madrid-nato-summit-june-2022/>
- DW. (2022). Scandinavian allies support Finnish, Swedish NATO bids. DW. <https://www.dw.com/en/scandinavian-allies-support-finnish-swedish-nato-bids/a-61688735>
- Erkus, S. (2022). Türkiye expects concrete steps from new Swedish government: FM. Daily News. <https://www.hurriyetdailynews.com/turkiye-expects-concrete-steps-from-new-swedish-government-fm-176943>
- EUAA. (2020). Syrian Democratic Forces and Asayish. European Union Agency for Asylum. <https://euaa.europa.eu/country-guidance-syria/12-syrian-democratic-forces-and-asayish>
- Fraser, S. (2023). Why Turkey's currency is crashing after Erdogan got reelected. AP News. <https://apnews.com/article/why-is-turkeys-currency-falling-erdogan-1faf7d58144fc84479c251c3fdeabe2a>
- Gauthier-Villars, D., Ceylan, A., & Toksabay, E. (2022). Six dead in Istanbul blast, Erdogan says it "smells like terrorism." Reuters. <https://www.reuters.com/world/middle-east/central-istanbul-blast-leaves-multiple-wounded-media-video-2022-11-13/>
- Government Offices of Sweden. (2024). Why Sweden joined NATO - a paradigm shift in Sweden's foreign and security policy. Government Offices of Sweden. <https://www.government.se/speeches/2024/04/why-sweden-joined-nato---a-paradigm-shift-in-swedens-foreign-and-security-policy/>
- Hayatsever, H., & Gumrukcu, T. (2024). Turkey approves Sweden's NATO membership bid after 20-month delay. Reuters. <https://www.reuters.com/world/turkey-set-approve-swedens-nato-membership-bid-after-long-delay-2024-01-23/>
- Hayatsever, H., & Spicer, J. (2024). Explainer: What Turkey gained in delaying Sweden's NATO bid. Reuters. <https://www.reuters.com/world/europe/what-turkey-gained-delaying-swedens-nato-bid-2023-11-29/>
- Holsti, K. J. (1982). Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World.
- Khayati, K. (2012). SWEDEN AS A GRAVITATION CENTER FOR THE KURDS – DIASPORA FORMATION. Diva Portal.
- Masters, J. (2023). What Is NATO? <https://www.cfr.org/backgrounder/what-nato>
- Mitchell, W. (2022). Putin's War Backfires as Finland, Sweden Seek to Join. 1–4.
- NATO. (2024). TÜRKİYE AND NATO. NATO. [https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified\\_191048.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_191048.htm)
- NCTC. (2022). KURDISTAN WORKERS' PARTY (PKK). Director of National Intelligence. [https://www.dni.gov/nctc/ftos/pkk\\_fto.html](https://www.dni.gov/nctc/ftos/pkk_fto.html)
- Pamuk, H. (2023). Turkey told NATO that Sweden ratification could come before year-end, US official says. Reuters. <https://www.reuters.com/world/turkey-told-nato-that-sweden-ratification-could-come-before-year-end-us-official-2023-11-28/>
- Radu, M. (1999). Is the PKK in Turkey on the Ropes? <https://www.fpri.org/article/1999/09/is-the-pkk-in-turkey-on-the-ropes/>

- RFERL. (2010). Turkey Recalls Envoy After Sweden Recognizes Armenian “Genocide.” Radio Free Europe/Radio Liberty.  
[https://www.rferl.org/a/Turkey\\_Recalls\\_Envoy\\_After\\_Sweden\\_Recognizes\\_Armenian\\_Genocide/1981705.html](https://www.rferl.org/a/Turkey_Recalls_Envoy_After_Sweden_Recognizes_Armenian_Genocide/1981705.html)
- Sorongan, T. P., & Arbar, T. F. (2023). Al-Qur'an Dibakar di Swedia-Denmark-Belanda. CNBC Indonesia.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231224210758-4-500101/al-quran-dibakar-di-swedia-denmark-belanda>
- Spicer, J., Hayatsever, H., & Gumrukcu, T. (2023). With eye on U.S., Turkey in no rush to back Sweden's NATO bid - sources. Reuters.  
<https://www.reuters.com/world/europe/with-eye-us-turkey-no-rush-back-swedens-nato-bid-sources-2023-10-16/>
- Sweden Government Communication. (2020). Strategic Export Controls in 2019 – Military Equipment and Dual-Use Items.
- TRT World. (2022). Sweden amends constitution to boost anti-terror law as demanded by Türkiye. TRT World.  
<https://www.trtworld.com/europe/sweden-amends-constitution-to-boost-anti-terror-law-as-demanded-by-turkiye-62618>
- Uras, U. (2019). Turkey's Operation Peace Spring in northern Syria: One month on. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2019/11/8/turkeys-operation-peace-spring-in-northern-syria-one-month-on>
- KlikJatim.com. Retrieved February 24, 2025, from KlikJatim.com website: <https://klikjatim.com/dampak-ekonomi-pembangunan-smelter-freeport-di-gresik-hasil-kan-multiplier-effect-rp2-triliun-untuk-umkm-lokal>
- Kompas. (2024). Riset TRI: Hilirisasi Ciptakan Banyak Lapangan Kerja dan Tingkatkan Perekonomian. Retrieved February 18, 2025, from KOMPAS.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/15/09183951/riset-tri-hilirisasi-ciptakan-banyak-lapangan-kerja-dan-tingkatkan>
- Mintz, A., & Karl Derouen Jr. (2010). Understanding Foreign Policy Decision Making. Cambridge University Press.
- Niaga Asia. (2024). Penerimaan Negara dari Smelter Freeport Indonesia Rp80 Triliun/Tahun. Retrieved February 24, 2025, from niaga.asia website: <https://www.niaga.asia/penerimaan-negara-dari-smelter-freeport-indonesia-rp80-triliun-tahun>
- Peraturan Pajak. (2023). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2023. Retrieved February 23, 2025, from PERATURAN PAJAK website: <https://peraturanpajak.com/2023/07/21/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomo-r-36-tahun-2023>
- Presiden Republik Indonesia. (2024a). Blocked. Retrieved February 13, 2025, from Presidenri.go.id website: <https://www.presidenri.go.id/siaran/pers/presiden-jokowi-hilirisasi-nikel-dan-sumber-daya-alam-jadi-kunci-peningkatan-economis-nasional>
- Presiden Republik Indonesia. (2024b). Resmikan Produksi Smelter PT Freeport Indonesia, Presiden Jokowi: Dorong Hilirisasi dan Penerimaan Negara. Retrieved February 24, 2025, from Presidenri.go.id website:

- <https://www.presidentri.go.id/siaranpers/resmikan-produksi-smelter-pt-freeport-indonesia-presiden-jokowi-dorong-hilirisa-si-dan-penerimaan-negara>
- Pusat Analisis Anggaran & Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI. (2024). STRATEGI OPTIMALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN HILIRISASI BAUKSIT.
- Soemanagara, D. F. (2022). Deretan Investor Asing yang Tertarik Investasi di Sektor Inovatif, dari Tesla hingga Foxconn. Retrieved February 23, 2025, from Bisnis.com website:  
<https://market.bisnis.com/read/20220404/192/1518665/deretan-investor-asing-yang-tertarik-investasi-di-sektor-inovatif-dari-tesla-hingga-foxconn>
- Tempo. (2023).
- Mengenal Bauksit dan Manfaatnya di Kehidupan Sehari-hari. Retrieved February 11, 2025, from Tempo website:  
<https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-bauksit-dan-manfaatnya-di-kehidupan-seharian-hari-823917>
- Yudha, M. (2025). Serapan Tenaga Kerja Cuma 2,4 Juta Orang Meski Investasi Rp 1.714 T? Menteri Rosan Ungkap Biang Keroknya. Retrieved February 18, 2025, from Viva.co.id website: <https://www.viva.co.id/bisnis/1794537-serapan-tenaga-kerja-cuma-24-juta-orang-meski-investasi-rp-1-714-t-menteri-rosan-ungkap-biang-keroknya>?